



Marak Penginapan Ilegal, Satpol PP Pastikan Pengawasan Terus Berjalan

YOGYA, TRIBUN - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY mengeluhkan maraknya akomodasi atau penginapan ilegal, yang disinyalir memicu turunnya okupansi hotel resmi di Kota Yogya.

Ketua PHRI DIY, Deddy Prano-wo Eryono, mengatakan, keberadaan penginapan yang tidak sesuai peruntukannya, seperti kos-kosan harian dan apartemen yang disewakan layaknya hotel, sangat memengaruhi pasarnya. "Secara aturan dan etika bisnis itu me-

nyalahi. Mereka tidak terpantau oleh pemerintah, padahal kita mendorong untuk legal supaya datanya valid," tegasnya, belum lama ini.

Ia berharap Pemerintah Kota maupun Kabupaten di DIY lebih tegas dalam menindak atau menertibkan akomodasi-akomodasi "gelap" tersebut. Tujuannya agar program kepariwisataan yang disusun pemerintah mempunyai basis data yang akurat, tidak hanya mengandalkan data dari anggota PHRI.

Kepala Bidang Penegakkan

Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Yogyakarta, Dodi Kurnianto, mengungkapkan, sepanjang Januari 2026, pihaknya sudah menerima aduan terkait operasional penginapan yang dianggap tak berizin. Salah satu kasus ditemukan di kawasan Keparakan, Kemantren Mergangsan, di mana warga setempat melaporkan aktivitas *homestay* yang diduga bodong karena sang pemilik tidak pernah melakukan sosialisasi.

"Warga berasumsi itu ilegal ka-

rena tidak pernah ada sosialisasi atau *kulo nuwun*. Tapi, setelah kami cek dan klarifikasi, ternyata izinnya lengkap," katanya, Senin (19/1).

Dodi menjelaskan, berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, banyak penginapan skala kecil atau *homestay* masuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI) penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya. Jenis usaha ini masuk kategori risiko rendah, sehingga

proses perizinan bisa langsung terbit melalui sistem tanpa memerlukan tanda tangan atau persetujuan tetangga kanan-kiri.

"Tapi, seharusnya pemilik *kulo nuwun* lah, kepada tokoh-tokoh masyarakat setempat, atau tetangga, supaya mereka tahu aktivitas penginapannya sudah punya izin dan sebagainya," terangnya.

Selain itu, ditemukan beberapa hotel atau losmen yang sudah lama berdiri, namun mati suri. Beberapa pemilik, sudah berusia lan-

jut dan tidak lagi memiliki kemampuan finansial maupun manajerial untuk bermigrasi ke sistem perizinan berbasis risiko (OSS).

Hingga kini, Satpol PP Kota Yogyakarta terus melakukan sinkronisasi data dengan Dinas Pariwisata dan DPMPTSP untuk memastikan seluruh akomodasi tertib administrasi. Ia pun membuka pintu bagi PHRI maupun masyarakat untuk melapor jika menemukan penginapan yang benar-benar melanggar ketertiban umum. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005